

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN PAVING JALAN DESA
(Studi Literasi Kebijakan Pemerintah Desa Pendem)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

ADMINISTRASI PUBLIK



OLEH:

YOHANIS UMBU ZOGARA

NIM : 2016210193

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2021

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN PAVING JALAN DESA
DI DESA PENDEM, KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU Yohanis
Umbu Zogara, Dody Setyawan, S.Sos;MAP, Firman Firdausi SH,MH**

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi
Malang

Email: anisputra919@gmail.com

RINGKASAN

Indonesia adalah negara yang besar dan berbeda dengan wilayah, wilayah/masyarakat perkotaan dan aturan. Badan-badan legislatif provinsi dan perkumpulan-perkumpulan orang perseorangan teritorial melakukan urusan pemerintahan yang ditunjukkan dengan standar kemerdekaan dan membantu tugas-tugas semaksimal mungkin dalam kerangka dan standar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Negara-negara teritorial adalah kepala daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten mandiri sebagai komponen organisasi pemerintahan provinsi.

Kota dikendalikan oleh Peraturan Nomor 6 Tahun 2014. Kota adalah unit wilayah lokal yang sah dengan batas wilayah yang disetujui untuk mengarahkan dan mengawasi masalah pemerintahan, kepentingan wilayah lokal, kebebasan awal, atau potensi hak adat yang dianggap dan dianggap dalam kerangka otoritas publik dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota adalah kesatuan wilayah hukum yang memiliki batas wilayah yang disetujui untuk mengarahkan dan mengawasi kegiatan pemerintah, kepentingan daerah, kebebasan awal, dan hak istimewa tambahan konvensional yang dianggap dan dianggap dalam pengaturan otoritas publik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa penting untuk berkonsentrasi pada bagaimana program pengaspalan jalan kota di Kota Pendem dijalankan. ketika. Membuktikan bahwa pendekatan tidak akan berhasil tanpa eksekusi yang baik dari produser strategi itu sendiri, seperti pembuat skenario yang baik itu sendiri, misalnya, pembuat strategi yang kuat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan pembersihan jalan kota yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pendem, sejauh korespondensi, sangat sukses, aset, karakter atau mentalitas individu, dan konstruksi administrasi Mendukung dan menahan faktor yang mempengaruhi implementasi program pembangunan paving jalan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa pendem, pembangunan paving jalan desa. serta adanya kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dengan baik. Faktor penghambat dari implementasi program pembangunan paving jalan desa dalam melaksanakan pembangunan.

Kata Kunci: Implementasi, Pembangunan Desa, Paving Jalan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang besar dan beragam dengan wilayah, wilayah/komunitas perkotaan dan rezim. Pemerintah provinsi dan kamar-kamar delegasi individu-individu lokal menyelesaikan tugas-tugas pemerintah yang ditunjukkan oleh standar kemerdekaan dan tugas bantuan, yang dianut dalam kerangka dan standar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 untuk ukuran waktu yang terbaik. Pemerintah provinsi adalah kepala daerah yang menggerakkan organisasi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten mandiri sebagai komponen organisasi pemerintahan daerah.

Kota dikendalikan dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2014. Kota adalah kesatuan wilayah yang sah dengan batas-batas wilayah yang disetujui untuk mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan daerah, hak-hak awal, serta kebebasan adat yang dirasakan dan dihormati dalam kekuasaan publik. kerangka. Kota adalah kesatuan wilayah yang sah dengan batas-batas wilayah yang disetujui untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan daerah setempat, hak-hak istimewa awal, serta kebebasan adat yang dianggap dan dianggap dalam pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ditawarkan kesempatan yang luar biasa untuk melakukan pemerintahan sendiri dan pelaksanaan perbaikan kota, pengembangan

wilayah kota, dan penguatan wilayah kota berdasarkan drive lokal, hak silsilah, dan adat istiadat dan juga kepentingan lokal terdekat.

Kemajuan pembersihan jalan kota di kota Pendem telah mengalami kemajuan yang pesat yang pada akhirnya memunculkan ide untuk pembersihan jalan kota dan harus bekerjasama dengan pemerintah daerah kota dengan mengadakan perbaikan untuk mengetahui bagaimana mengukur kemajuan dan bagaimana melakukan pembersihan jalan di kota tersebut. kota Pendem.

Pemkot Pendem secara progresif menyelesaikan pembangunan pembukaan jalan kota, salah satunya pembangunan pembersihan jalan, seperti yang ditunjukkan oleh kepala kota.

Pendem (Tri Wahyuwono Efendi) perbaikan ini dibiayai dari Town Asset Portion (ADD) kemajuan ini belum selesai. Isu pembersihan jalan kota tidak sesuai dengan keanehan yang terjadi di lapangan. Dilihat dari beberapa pengertian pembangunan kota di atas, maka dapat dipersepsikan bahwa penataan kota adalah suatu kemajuan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan dukungan Badan Permusyawaratan Kota (BPD) dan orang-orang daerah setempat untuk menggunakan dan menetapkan aset kota untuk mencapai tujuan perbaikan kota. Kemajuan kota adalah pekerjaan untuk bekerja pada kepuasan pribadi dan bantuan pemerintah dari jaringan pedesaan secara keseluruhan. Maka dari itu latar belakang diatas penelitian/meneliti dengan judul “Implementasi Program Pembangunan Paving Jalan Desa di Desa Pendem.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perubahan jalan sebelum/sesudah adanya pembangunan paving jalan Desa di Desa pendem ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Pembangunan Paving Jalan Desa di Desa Pendem ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana sebelum/sesudah adanya pembangunan paving jalan Desa di Desa Pendem.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi ataupun sarana, baik itu berupa data dan informasi sebagai bahan untuk melaksanakan penelitian. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang akan datang dapat dijadikan masukan bagi pemerintah desa pendem, mengatasi permasalahan kebijakan melaksanakan pembangunan paving jalan Desa di Desa Pendem.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. 2001. Instrumen kemajuan kota, kerjasama daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dari satu perspektif. Jakarta:Rineka Cipta.
- Anggara, Sahya. 2014. Prolog untuk pengaturan publik. Bandung: Perpustakaan Terpercaya.
- Agus, Erwan dan Ratih, Dyah. 2012. Pelaksanaan penataan umum: ide dan aplikasi di Indonesia. Pengetahuan Media Malang.
- Agustinus. 2008. Eksekusi strategi dalam bukunya Pokok-Pokok Pengaturan Publik. Pujian Enda wajar, Riyanto, Romula Adiono. Bandung: Alfabeta.
- Basuki, Sulistyono. 2010. Teknik Penelitian. Jakarta: Penaku
- Kartasasmita. 2001. Peningkatan kemampuan dan aset masyarakat sebagai pelaksana dan penggerak. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Djunaidi, Berputar. (2019) Pelaksanaan Pembangunan Jalan Ekologi Kawasan Lokal dalam Pengerjaan Administrasi Terbuka pada Administrasi Permukiman dan Organisasi
- Endah Puji Lestari. 2017. Eksekusi strategi peningkatan kerangka provinsi untuk pembukaan jalan kota. Buku harian manajemen kebijakan, vol. 3, No. 5. Masuk akal. Kota Samarinda."Jurnal Paradigma (JP). Vol. 3.1 Djunaidi Swirl.
- Kuncoro, Nur Muhammad Wahyu. 2012.69 Guncangan Kasus yang Sah Indonesia. Depok : (Pedagang Temu Peningkatan Diri).
- Lassa HS.2009. Referensi Kata Kurator Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Perpustakaan Buku.
- Martino Parerira. 2015. Eksekusi proyek peningkatan desentralisasi I dan II untuk memperkuat perekonomian. Buku harian strategi, vol.4, No. 1. Pareira.
- Mudiyono, Rachmat, and Nadia Salsabilla Tsani.(2019) Kajian Dampak Kliring Bentuk Persegi pada Kelonggaran Aspal Jalan." Audit dalam Perancangan Struktur. Vol.3, No. 1 Mudiyono.
- Makmur dan Rohana Thahier. 2016. Organisasi dan Asosiasi Pengaturan Publik yang Berorientasi Teori dan Konteks. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Nugroho, Riant. 2006. Pendekatan Publik untuk Negara Berkembang:

- Model untuk Definisi, Eksekusi, dan Penilaian. Jakarta:PT. Pendaftaran Elex Media
- Rachmad, Mudiyo. 2019. Investigasi dampak keadaan clearing block terhadap kelonggaran aspal. Buku harian fisika, vol. 3, No. 1.Mudiyo.
- Sekarsari, Retno Wulan, dan Suyeno Suyeno. (2018) Eksekusi Strategi Pemajuan Jalan Antar Sub Wilayah di Rezim Kediri." JU-ke (Diary of Food Security) indo.
- Subarto, Ag. 2015. Ujian Pendekatan Publik: Gagasan, Hipotesis, dan Aplikasi, Yogyakarta: Perpustakaan Mahasiswa.
- Suparno. 2001. Persepsi, sebuah siklus yang terbuat dari siklus alam dan mental yang berbeda
- Sugiyono.2013. Prosedur pemilihan informasi merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena tujuan eksplorasi adalah untuk mendapatkan informasi melalui Alfabeta Bandung.
- Sekarsari, R. W., dan Suyeno, S. 2018. Eksekusi Strategi Perbaikan Jalan Antar Wilayah di Pemerintahan Kediri. JU-ke (Buku Harian Ketahanan Pangan).
- Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota. Pedoman pelayanan kota.
- Pembenahan Daerah Terlarang, dan Keimigrasian Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. Investigasi Strategi: Dari Satu Definisi ke Definisi lainnya, Model Eksekusi Pendekatan Publik. Jakarta: PT. Tulisan Bumi.
- Wiratna. 2014. menyatakan bahwa dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi subjektif untuk berbagai realitas dan informasi disimpan sebagai dokumentasi. Malang: Sekolah Tinggi Muhammadiyah.
- Otoritas, Samodra. 2011. Masalah Pemerintah Perumus Pengaturan Umum. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2008. Pendekatan Publik: Hipotesis Dan Interaksi. Yogyakarta: Media Pers.
- Widodo, Joko. 2016. Ujian Pengaturan Publik: Ide Dan Aplikasi, Investigasi Siklus Pendekatan Publik. Malang: Media Nusa Inovatif